

**ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT
TENTANG PENDIDIKAN MILITER SEBAGAI
PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**



**Asy Syahid Ikhsan Quddus
NIM. 2223150038**

**ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT
TENTANG PENDIDIKAN MILITER SEBAGAI
PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Asy Syahid Ikhsan Quddus

NIM. 2223150038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2026 M/ 1448 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax. (0736) 51171-51172

Website : www.uinfashengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

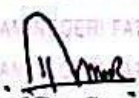
Skripsi yang ditulis oleh Asy Syahid Ikhsan Quddus, NIM : 2223150038 dengan judul **"ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENDIDIKAN MILITER SEBAGAI PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH"** Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2026

Muharram 1448 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., MA
NIP.196904021999031004


Adh Kosasih, SH., MH
NIP.198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax. (0736) 51171-51172
Website : www.uinfatbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR
JAWA BARAT TENTANG PENDIDIKAN MILITER SEBAGAI
PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH"** oleh Asy Syahid Ikhsan Quddus, NIM:
2223150038 Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji
dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqosyah* Fakultas Syariah UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Juli 2026

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Tata
Negara dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Bengkulu, Agustus 2026 M
Safar 1448 H



Im Fahimah, LC., MA
NIP. 197307122006042001

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Suwarjin, S.Ag. MA
NIP. 196904021999031004

Ade Kosasih, SH., MH
NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Sirajudin M.Ag. MH
NIP. 1960030719992021001

Risfiana Mayang Sari, SH., MH
NIP. 199305112020122012

MOTTO

Saya Tidak Dilahirkan Hanya Untuk Menjadi Orang Gagal



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Alamin dengan penuh rasa syukur dan mengharap ridho Allah SWT. Berkat rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Serta keluarga dan sahabat. Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembaran pengesahan. Rasa syukur dan bahagia yang dirasakan saya persembahkan teruntuk orang-orang yang saya sayangi dan selalu memberikan support serta doa yang tiada henti:

1. Kepada kedua orang tua kandung dan orang tua angkat saya, Abi, Umi, Ayah dan Bunda yang telah selama ini merawat, membantu, memberikan dukungan motivasi, dan mendidik syahid sampai hingga pada saat ini dan pada akhirnya mampu untuk menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan Sarjana. Terimakasih atas semua hal yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Kepada mantan dekan fakultas syariah UIN Fatmawati sukarno Bengkulu yang juga sekaligus menjadi Pembimbing I saya, bapak Prof. Suwarjin, S.Ag MA. Beliau tidak hanya mengajarkan materi akademik dan nilai-nilai pendidikan secara etis, tetapi juga memberikan dukungan moril serta materiil yang luar biasa dengan mendanai seluruh aktivitas saya di luar perkuliahan, yang mengantarkan saya berkompetisi dari tingkat regional hingga internasional; terima kasih atas bimbingan, kesabaran,

dan ketulusan Profesor dalam mengawal perjalanan akademik saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Kepada Mentor dan juga sekaligus Dosen Pembimbing II saya, bapak Ade Kosasih, SH., MH. yang telah memberikan dedikasi luar biasa dalam membimbing penyusunan skripsi ini hingga selesai. Lebih dari sekadar pembimbing, beliau adalah sosok yang paling berperan penting dalam menanamkan dan membentuk bibit keilmuan Hukum Tata Negara serta Hukum Administrasi Negara di dalam diri saya berkat pengajaran, arahan, dan transfer ilmu yang beliau berikan, baik didalam atau diluar perkuliahan saya mampu tumbuh dan mencapai tingkat pemahaman serta penguasaan ilmu hukum tata negara dengan baik seperti saat ini.
4. Kepada Prof. Rohmadi, M.A., selaku mantan Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah, saya haturkan rasa hormat yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tulus atas segala dukungan moral serta material yang telah diberikan selama masa perkuliahan saya. Beliau adalah sosok yang senantiasa peduli dan tulus membantu menyelesaikan berbagai tantangan serta permasalahan saya sebagai seorang mahasiswa, sekaligus menjadi orang yang sangat berjasa dalam membimbing saya hingga berhasil mendapatkan Beasiswa Prestasi Bank Indonesia yang mana beasiswa tersebut merupakan sebuah *privilege* yang sangat krusial dan mendalam pengaruhnya bagi keberlangsungan proses perkuliahan sarjana S1 saya, dan tanpa

kebaikan serta jasa besar dari beliau, penghargaan berharga ini kiranya tidak akan pernah bisa saya raih.

5. Kepada sahabat terbaik sekaligus rekan seperjuangan saya semasa perkuliahan, Anggi Dama Putra, saya haturkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala momen, tawa, dan masa-masa tak terlupakan yang telah kita lalui bersama di bangku kuliah. Beliau adalah sosok yang tidak hanya hadir sebagai sahabat, melainkan telah menjadi inspirasi itu sendiri bagi saya sebagai tolak ukur serta pemicu utama untuk terus bergerak dan berkembang maju sekaligus menjadi teman diskusi intelektual hukum yang luar biasa mendalam; yang mana melalui ruang-ruang diskusi dan dialektika yang konsisten bersamanya, secara berangsur-angsur telah menempa, memperkuat, serta memperkokoh fondasi dasar keilmuan Hukum Tata Negara di dalam diri saya hingga saat ini.
6. Kepada seluruh pihak, kerabat, serta rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya haturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya.
7. Terimakasih Kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Pendidikan Militer Sebagai Penanggulangan Kenakalan Remaja Perspektif Siyasah Tanfidziyah" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Juni 2026
Saya menyatakan

Hsan Quddus
NIM.2223100038

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Pendidikan Militer Sebagai Penanggulangan Kenakalan Remaja Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Asy Syahid Ikhsan Quddus

Skripsi ini menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai pemberlakuan pendidikan militer maupun semi-militer bagi peserta didik yang memiliki perilaku khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 45/PK.03.04/KESRA. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua batasan masalah utama: pertama, untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kebijakan pendidikan militer dalam penanggulangan kenakalan remaja berdasarkan hukum positif; kedua, untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasah Tanfidziyah (fiqh politik eksekutif/pemerintahan) terhadap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer dan sekunder seperti UUD NRI 1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur fiqh siyasah dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum positif, kebijakan ini merupakan perwujudan diskresi (*freies ermesen*) kepala daerah dalam merespons realitas sosial (*das sein*) tingginya angka kenakalan remaja di Jawa Barat. Namun, terdapat kesenjangan normatif (*das sollen*) karena penggunaan instrumen Surat Edaran dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang kuat untuk mengatur pembatasan hak peserta didik. Penempatan pelajar sipil di barak militer (Kodam III Siliwangi) juga berpotensi menimbulkan benturan norma terkait jaminan perlindungan anak dan sifat pedagogis-humanis pendidikan nasional. Sementara dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kebijakan ini pada dasarnya selaras dengan asas *Tasharruf al-Imam 'ala al-Raiyyah Manuthun bi al-Mashlahah* (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat). Kendati demikian, implementasinya harus tetap memenuhi kaidah tata kelola pemerintahan Islam yang mengedepankan keadilan dan prinsip menghindari kemudharatan (*dar' al-mafasid*), sehingga pola pembinaan yang diterapkan wajib steril dari tindakan kekerasan ala militer yang dapat mengancam tumbuh kembang fisik maupun psikologis anak.

Kata Kunci: Kebijakan Jawa Barat, Pendidikan Militer, Kenakalan Remaja, Hukum Tata Negara, *Siyasah Tanfidziyah*

ABSTRACT

An Analysis of the Governor of West Java's Policy on Military Education as a Countermeasure for Juvenile Delinquency: A Siyasah Tanfidziyah Perspective

By: Asy Syahid Ikhsan Quddus

This undergraduate thesis analyzes the regional government policy in West Java regarding the implementation of military or semi-military training for students exhibiting specific behavioral issues, as regulated under the Circular Letter Number 43/PK.03.04/KESRA. This research aims to address two primary questions: first, to examine the juridical aspects of the military education policy as a tool to curb juvenile delinquency from a positive law stance; second, to evaluate the policy through the lens of Siyasah Tanfidziyah (Islamic administrative/executive politics). This study employs a normative juridical research method (library research) using a statutory approach. Primary and secondary legal materials, including the 1945 Constitution, Law No. 20 of 2003 on the National Education System, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and classical Islamic jurisprudence texts on fiqh siyasah, were analyzed qualitatively through legal interpretation. The results show that from a positive law perspective, the policy represents the regional executive's discretionary power (*freies ermesen*) in addressing a pressing social reality, namely the high rate of juvenile delinquency in West Java. However, a tension exists between *das sollen* (normative law) and *das sein* (empirical reality). The use of a Circular Letter as a regulatory tool lacks sufficient binding power to restrict student liberties, and placing civilian minors in military barracks (Kodam III Siliwangi) potentially conflicts with child protection norms and the humanistic-pedagogical principles of national education. From the Siyasah Tanfidziyah perspective, the policy aligns with the principle of *Tasharruf al-Imam 'ala al-Raiyyah Manuthun bi al-Mashlahah* (a leader's policy must be oriented toward public welfare). Nonetheless, the execution must adhere strictly to the tenets of Islamic governance, which demand absolute justice, administrative precision, and the avoidance of harm (*dar' al-mafasid*), meaning the training must eliminate any harsh militaristic methods that endanger the psychological and physical well-being of the youth.

Keywords: West Java Policy, Military Education, Juvenile Delinquency, Constitutional Law, Siyasah Tanfidziyah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. Karena atas limpah rahmat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Air Kotok Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah” Shalawat serta salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Saw. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan dan motivasi dan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.Khairuddin,M.Ag, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membina ilmu pengetahuan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof.Dr.lim Fahimah,LC.,M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Prof. Suwarjin, S.Ag MA. selaku pembimbing I yang memberikan bimbingan,motivasi, dan arahan dengan semangat.
4. Ade Kosasih, SH,. MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran

5. Hidayat Darussalam, M.E.Sy, selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Pejabat dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Serta semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini

Kemudian penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan maka penulis mengucapkan permohonan maaf, harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna sebagaimana mestinya.

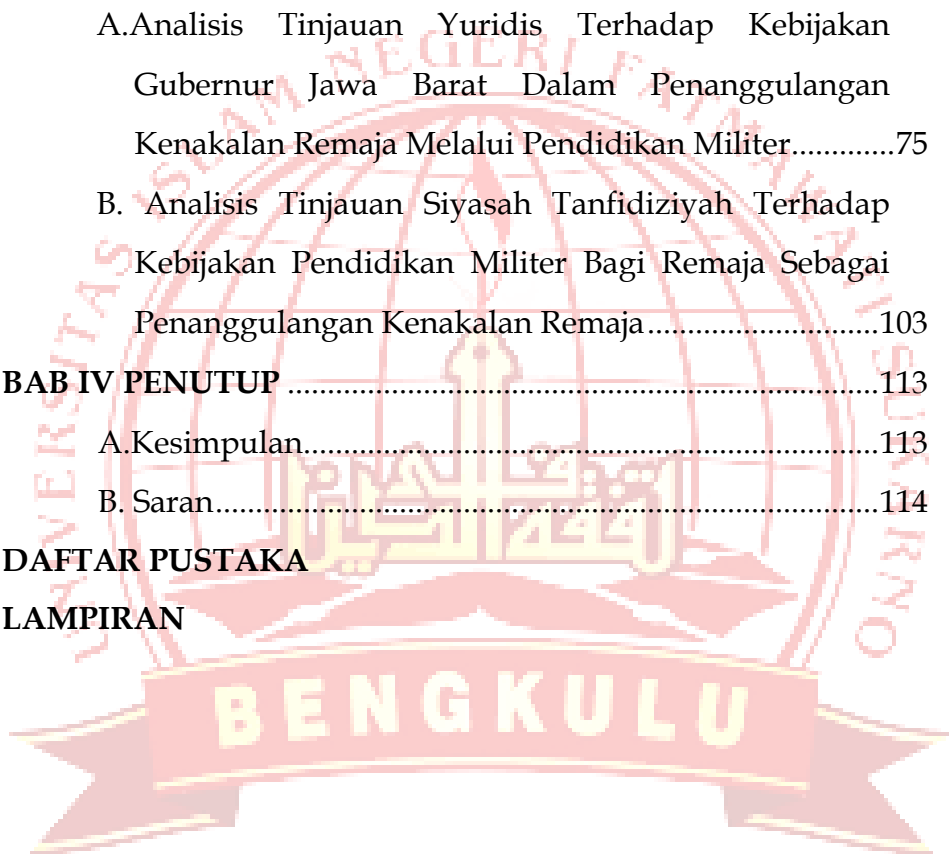
Bengkulu, Juni 2026
Penulis

Asy Syahid Ikhsan Quddus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
ABSTRACT.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis dan Sumber Bahan hukum.....	16
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
4. Teknik analisis bahan hukum	20
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II KAJIAN TEORITIS	23
A.Teori Kewenangan	23
B.Teori Hukum Pembangunan.....	40
C.Teori Siyasah Tanfidziyah	62
BAB III PEMBAHASAN	67
A.Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer.....	75
B. Analisis Tinjauan Siyasah Tanfidiziyah Terhadap Kebijakan Pendidikan Militer Bagi Remaja Sebagai Penanggulangan Kenakalan Remaja.....	103
BAB IV PENUTUP	113
A.Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.1. Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat.....	33
Tabel 3.1. Data Kenakalan Remaja di Jawa Barat.....	71

